

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Manajemen (M.M) Dalam Bidang Ilmu Manajemen**

OLEH

**NAMA : BAYU RUKMA
NPM: 162 003 0170**

Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **BAYU RUKMA**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620030017
Prodi / Konsentrasi : Magister Manajemen / Manajemen SDM
Judul Tesis : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara

Medan, 22 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SAIFUL BAHRI, M.AP

H. MUIS FAUZI RAMBE, S.E,M.M

PENGESAHAN

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**BAYU RUKMA
1620030017**

Program Studi : Magister Manajemen

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Manajemen (MM)
Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Maret 2018

PANITIA PENGUJI

1. **Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**
Ketua
2. **H. MUIS FAUZI RAMBE, SE, MM**
Sekertaris
3. **Dr. Sjahril Effendy P, M.Si, MA, M.Pdi, MH**
Anggota
4. **FAHRIZAL ZULKARNAIN, ST, M.Sc. Ph.D**
Anggota
5. **Dr. AMINI, M.Pd**
Anggota



Bayu Rukma. NPM. 1620030017 .

ABSTRAK

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tesis 2018

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda. Uji regresi berganda bertujuan secara dasar sama dengan korelasi sederhana atau berganda, yakni ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling*. Sampel penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah kabupaten deli serdang dari tahun 2009 hingga 2016.

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun secara simultan. Dari tiga variabel bebas yang digunakan terdapat pengaruh positif dan negative dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

Bayu Rukma. NPM. 1620030017 .

ABSTRACT

Effect of Original Income, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to Capital Expenditure of Deli Serdang Regency Government. Thesis 2018

The purpose of this research is to know the influence of local income, general allocation fund and special allocation fund to capital expenditure of Deli Serdang regency government.

This study uses a type of associative research that aims to analyze the relationship between one variable with other variables or explain the influence of independent variables on bound. To test the hypothesis done by multiple regression test. Multiple regression tests aim basically the same as simple or multiple correlation, ie want to know whether there is influence between two variables. Sampling technique used in this research is Convenience Sampling. The samples of this study used the finances of district government deli serdang from 2009 to 2016.

From the results of this study proved that there is influence of Original Income, And General Allocation and Special Allocation Fund to Capital Expenditure either partially or simultaneously. Of the three free variables used there are positive and negative influences where General Allocation Fund negatively affect the Capital Expenditures of deli district government, and Local Original Fund and Special Allocation Fund have a positive effect on Capital Expenditure of deli district government.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ilahi robbi, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya.

Tak lupa shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Penulis menyelesaikan proposal ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berisikan hasil penelitian awal penulis yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”**.

Dalam penulisan proposal ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha, bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya proposal ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, MAP, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Sjahril Effendy P, MSi, MA, M.Psi, MH , selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zul Aspan Pasaribu, selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Bapak H. Muis Fauzi Rambe, SE, MM, selaku Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah dengan sabar memebrikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak /Ibu Dosen dan Staff Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Orang tua tercinta yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat meraih mimpi-mimpi dalam hidup saya, jasa kalian tidak akan mampu terbalaskan.
8. Istriku tercinta dan Anak-anakku tersayang yang telah dengan sabar memotivasi dan memberikan dukungan tiada hentinya kepada penulis.
9. Teman – teman se-angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sesuai yang kita harapkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan dapat ditindaklanjuti.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat, nikmat dan karunia-Nya dan memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan tesis ini.

Wassalam

Medan 2018

Penulis,

BAYU RUKMA, SE
1620030017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Belanja Modal	11
a. Pengertian Belanja Modal	11
b. Klasifikasi Belanja Modal	12
c. Jenis-jenis Belanja Modal	17
2. Anggaran Daerah	19
a. Pengertian Anggaran Daerah	19
b. Anggaran Daerah Sektor Publik	21
c. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	22
d. Klasifikasi anggaran.....	22
3. Pendapatan Asli daerah.....	23

a.	Pengertian Pendapatan Asli daerah.....	23
b.	Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli daerah	24
c.	Dasar Pengukuran Pendapatan Asli daerah	27
4.	Dana Alokasi Umum.....	28
a.	Pengertian Dana Alokasi Umum.....	28
b.	Tujuan dan manfaat Dana Alokasi Umum	29
c.	Dasar Pengukuran Dana Alokasi Umum	31
5.	Dana Alokasi Khusus.....	32
a.	Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	32
b.	Tujuan dan manfaat Dana Alokasi Khusus	33
c.	Dasar Pengukuran Dana Alokasi Khusus	34
B.	Kerangka Konseptual	35
C.	Hipotesis	39
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	41
A.	Pendekatan Penelitian	41
B.	Defenisi Operasional	41
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D.	Populasi dan Sampel	42
E.	Teknis Pengumpulan Data	43
1.	Analisis statistik deskriptif	44
1.1.	Uji Asumsi Klasik.....	44
1.1.1.	Uji Normalitas Data	44
1.1.2.	Uji Multikolinieritas	45
1.1.3.	Uji Heteroskedastisitas	46

F. Teknik Analisis Data	46
1. Analisis Regresi Linier Berganda	46
2. Uji Hipotesis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	78
C. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1. Rata –rata pendapatan asli daerah, danaa alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal kabupaten deli serdang periode 2009-2016 -----	5
3.1. Jadwal dan waktu penelitian-----	41
4.1. Rata –rata pendapatan asli daerah, danaa alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal kabupaten deli serdang periode 2009-2016 -----	54
4.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Belanja Modal-----	54
4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pedapan Asli Daerah-----	55
4.4 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dana Alokasi Umum-----	55
4.5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dana Alokasi Khusus -----	56
4.6. Uji Normalitas- One Sample Kolmogorov Smirnov Test-----	57
4.7. Uji Multikolineritas -----	58
4.8. Nilai Analisis Regresi Linear Berganda -----	60
4.9. Nilai Uji Parsial (t)-----	61
4.10. Hasil Uji F -----	67
4.11. Koefisien Determinasi -----	65

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Konseptual-----	37
3.1	Kriteria Pengujian Uji -t-----	50
3.2	Kriteria Pengujian Uji -f -----	51
4.1	Scatterplot-----	59
4.2	Kurva Uji Variabel Pendapatan Asli Daerah-----	63
4.3	Kurva Uji Variabel Dana Alokasi Umum -----	65
4.4	Kurva Uji Variabel Dana Alokasi Khusus -----	67
4.5	Kurva Uji F -----	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, Anggaran Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Menurut Halim, (2009; 156) “Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah - daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah”.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003; 179) menyatakan bahwa “pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan”. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang

dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena itu anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif.

Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi Desentralisasi Fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola suatu daerah. Akan tetapi Desentralisasi Fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian Adi (2005) menyatakan bahwa terjadi

Disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini dikarenakan, daerah yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan keuangan berupa Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Program pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih ekstra yang berdampak pada meningkatnya Belanja Modal Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Belanja Modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Sebagian besar dana belanja modal pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai sektor salah satunya adalah pengutan pajak. Menurut Isdijoso (2002; 153) “Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan Akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil Perusahaan Milik Daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Namun pendanaan yang bersumber dari PAD tidak dapat memenuhi Belanja Modal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah hal ini disebabkan oleh Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah “dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”.

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata Rata-rata Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 – 2016 sebesar 553,302 juta rupiah, dapat dilihat dari nilai rata-rata pertahunnya terdapat 2 tahun berturut-turut yang berada dibawah rata-rata yaitu tahun 2011 dengan nilai 370,579 juta rupiah, tahun 2012 sebesar 448,116 juta rupiah dan

pada tahun 2013 sebesar 505,826 juta rupiah, besaran nilai yang berada dibawah rata-rata pertahun tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, disisi lain terlalu rendahnya kontribusi yang diberikan DAK menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata pada tahun tersebut.

Tabel 1.1 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal KabupatenDeli Serdang Tahun 2010 – 2016 dalam satuan juta rupiah

Tahun	Pendapatn Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2009	103.686	784.016	91.188	291.177
2010	120.537	793.141	85.589	203.001
2011	213.791	888.557	67.178	314.745
2012	291.017	1.100.013	65.478	334.254
2013	328.348	1.260.755	81.876	352.334
2014	433.885	1.363.811	104.687	553.705
2015	515.293	1.396.297	117.332	491.710
2016	573.010	1.494.821	408.339	561.285

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang

Terlihat pada table 1.1 terlihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dibandingkan persentase Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Modal dapat dilihat tahun 2011 hingga 2013 dimana nilai Pendapataan Asli Daerah masih berada dibawah nilai Belanja Modal. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari Pemerintah Pusat yang disebabkan Pendapatan Asli Daerah jauh lebih kecil dari pada penerimaan dana dari pusat dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Selain dari itu dapat terlihat dimana pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil tidak dapat mengimbangi Belanja Modal, hal ini tidak sebanding

dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Kemudian kenaikan Dana Alokasi Umum yang signifikan terus meningkat tidak dibarengi dengan besarnya peningkatan Belanja Modal yang meningkat sedikit demi sedikit. Hal tersebut tidak sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dengan Belanja Modal.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan Anggaran Daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

Pada penelitian terdahulu Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwasumber pendapatan daerah berupa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total Pendapatan Daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Santosa dan Rofiq (2013) menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja

Modal. Sedangkan Setiyani (2009) berpendapat bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Bedasarkan keterangan dan uraian – uraian diatas mengenai penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian tersebut dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Desentralisasi yang dilakukan pemerintah menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Daerah yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber Pendanaan Daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.
- 2) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar daerah setelah retribusi dan pajak daerah belum mampu memenuhi pendanaan yang akan digunakan untuk Belanja Modal Pemerintah.
- 3) Ketergantungan yang besar Pemerintah Daerah pada Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat khususnya pada Dana Alokasi Umum dan Khusus yang digunakan untuk menutupi kekurangan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 1.1 dimana Pendapatan Asli Daerah belum dapat memenuhi Belanja Modal.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?
- 3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?
- 4) Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan (serentak) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada manajemen keuangan sebagai pertimbangan atas pengelolaan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan yang dalam penelitian ini berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

3) Manfaat Penelitian Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan penelitian ini pada tempat dimana peneliti bekerja, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Deli Serdang

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Syaiful (2010; 264) kategori belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset

tetap oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan teori menurut para ahli dan undang – undang dapat disimpulkan belanja modal merupakan alokasi dana yang disiapkan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

b. Klasifikasi Belanja

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Berdasarkan PP No. 24/2005 Berdasarkan SAP (PP No. 24/2005), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing - masing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, Belanja Operasi terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bagi Hasil. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dengan demikian, jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas :

- a) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil.

- b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang, jasa, ongkos kantor, perjalanan dinas dan pemeliharaan.
- c) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang/pinjaman daerah baik yang bersifat pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang.
- d) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Pihak-pihak tertentu seperti kepada: pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah daerah di luar wilayah provinsi, atau hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah provinsi atau dari provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD, perusahaan negara/BUMN dan masyarakat.
- f) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang

dibagikan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

- g) Belanja Bantuan Keuangan/sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi. Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa dapat dikelompokkan ke dalam bantuan bersifat umum (*block grant*) atau bantuan bersifat khusus (*specific grant*). Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa tertentu yang pedoman penggunaannya dapat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan prioritas provinsi/kabupaten/kota atau sesuai dengan usulan kabupaten/kota/pemerintahan desa yang membutuhkan.
- h) Belanja tidak terduga, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran guna penanganan bencana alam, bencana sosial atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

2. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Klasifikasi Fungsi

Belanja Daerah menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

4. Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

c. Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja modal merupakan aktifitas pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap pemerintah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Syaiful, (2010; 215) adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal, adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan,

pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan jenisnya Belanja Modal yang digunakan secara keseluruhan dikelompokan berdasarkan fungsinya dimana belanja modal tanah digunakan untuk adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor begitu juga seterusnya dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal disesuaikan dengan fungsi yang seharusnya.

2. Anggaran Daerah

a. Pengertian Anggaran daerah

Anggaran Daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003). Mardiasmo (2004; 157) menyatakan bahwa “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran ”

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Darwanto (2007; 239) menyatakan bahwa “ penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning, legislative approval, executive implementation, and ex post accountability*” . Pada tahapan

executive planning dan legislative approval terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation dan expost accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. Menurut Mardiasmo (2004; 261), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. anggaran modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Anggaran sektor publik memiliki berdasarkan dengan kegunaannya dimana anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan Anggaran Modal adalah Anggaran Jangka Panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya

b. Anggaran Daerah sektor publik

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah

pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Mardiasmo, (2004; 157) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

c. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan akibat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya disusun oleh Pemda untuk disetujui. Setelah Pemda menyetujui KUA-PPAS, selanjutnya disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

d. Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri dari 3 bagian, yaitu “pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.” Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Berdasarkan Permendagri 13/2006 “pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan”. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan

penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok piutang, dan pemberian pinjaman daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli daerah

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah .

Menurut Isdijoso (2002; 153) “Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan keterangan teori yang telah disampaikan maka Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan sebagai pendapatan yang berasal dari Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

b. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yani (2009 :217), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Selain pajak daerah, terdapat pula retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan Retribusi merupakan sumber yang harus dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang

sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Menurut Isdijoso (2002; 164) “pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No. 32/2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah; Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009). Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 2) Hasil retribusi daerah; Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :
 - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa Giro
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasi, (2007) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

c. Dasar Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18). Indikator PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain – lain pendapatan daerah yang sah.}$$

4. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi anatar daerah sehingga pemerintah pusat memberikan dana tersebut kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Menurut Halim (2009; 127), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah”. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut (PP No.55/2005) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan teori yang telah disampaikan berdasarkan undang-undang dan menurut ahli dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Tujuan dan Manfaat Dana Alokasi Umum

Penggunaan pendapatan asli daerah tidak dapat sepenuhnya menopang kebutuhan pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan dana perimbangan sebagai pendorong stabilitas keuangan pemerintah daerah salah satu bagian dari dana perimbangan adalah dana alokasi umum. Pratiwi (2007; 183) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*); Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
2. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
3. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *block grant* (Dana Alokasi Umum), dan (2) *specific grant* (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan *local discretion*, grant yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant*. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa penghitungan DAU didasarkan pada dua faktor,

yaitu: (1) faktor murni, dan (2) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah penghitungan DAU berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam penghitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni.

Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami lonjakan penerimaan yang luar biasa. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Menurut Halim, (2009; 273) Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sedangkan menurut PP No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010 bahwa Dana alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.
2. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa “ kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah ”. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

c. Dasar Pengukuran Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Indikator DAU adalah sebagai berikut: 1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif. 2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM) Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran DAU dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{DAU Kota} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN (Pendapatan Dalam Negeri)} \times \text{Bobot DAU}$$

5. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah “dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”. Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Berdasarkan teori yang disampaikan maka dapat disimpulkan dana alokasi khusus merupakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang menjadi bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

b. Tujuan dan Manfaat Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, “Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dalam website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

c. Dasar Pengukuran Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut:

1. Umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
3. Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK seta dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh penulis sebagai fenomena yang akan diteliti.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik. Santosa dan Rofiq (2013) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap

penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa secara empiris membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Penelitian ini dilakukan di DIY dan Jawa Tengah.

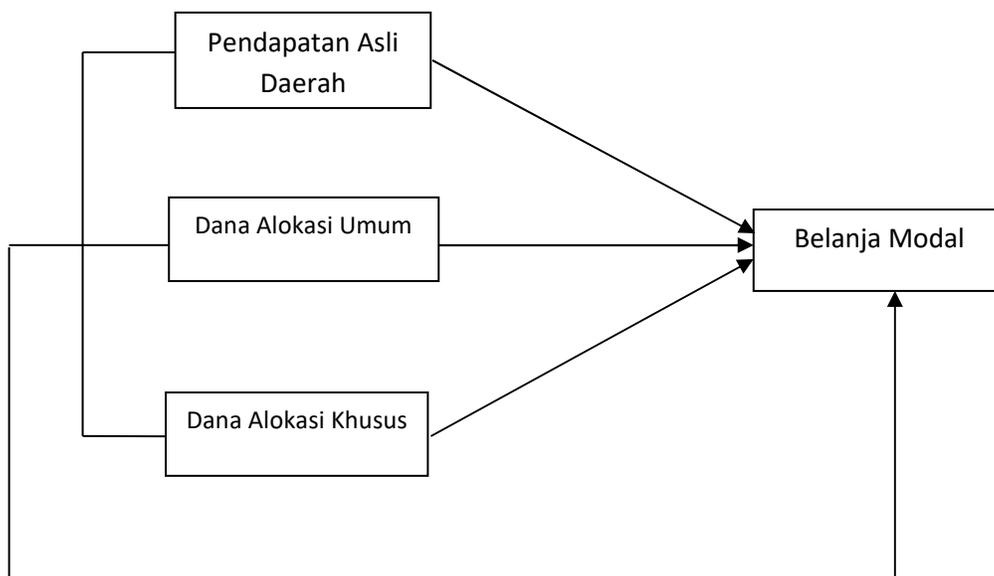
Hasil penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Hariyanto Adi menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja

Modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Peneliti

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan proporsi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu yang dianggap benar dan dijadikan sebagai jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang dikembangkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2009– 2016.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2009 – 2016.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2009 – 2016.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan (serentak) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2009 – 2016.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode asosiatif menurut Sugiyono (2011; 11) “penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk ,mengetahui pengaruh antar variabel bebas X terhadap variabel terikat Y dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu”. Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

B. Defenisi Operasional

Sugiyono (2011; 19) menyatakan bahwa “variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau sifat orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya”.

Penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat, 3 variabel bebas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel bebas (X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan pada variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dari penelitian ini adalah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana

dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Dana Alokasi Umum (X_2)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

c. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah “dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu” (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus.

2. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat yang digunakan adalah : Belanja Modal.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

C.Tempat dan Waktu Penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahan kabupaten Deli Serdang
- 2) Waktu penelitian direncanakan dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Adapun Jadwal Penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal dan waktu penelitian

No	Kegiatan	Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset	■											
2.	Penyusunan Proposal		■	■									
3.	Seminar Proposal			■									
4.	Pengumpulan Data				■								
5.	Analisa Data					■	■						
6.	Menyusun Laporan Tesis					■	■						
7.	Seminar Hasil							■	■	■			
8.	Ujian Tesis							■	■	■	■	■	■

Sumber : diolah peneliti

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2011; 281) pengertian populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pandangan di atas, objek/subyek yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011; 327) sampel adalah “ bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut ”. Kendala memperoleh data yang sulit dalam penelitian ini maka peneliti maka prosedur pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *Convenience Sampling*.

Sampel yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Periode waktu Tahun 2009 – 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Main data yang digunakan dalam penelitian berjenis data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini berdimensi time series dan pooled data, sehingga sampel sesungguhnya bukanlah sampel dari unit sampel, melainkan sampel observasi yang dihitung dengan cara mengalikan unit sampel terpilih dengan jumlah tahun amatan.

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan.

1.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokidastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1.1.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, penelitian ini menggunakan analisis statistik. Analisis statistik merupakan alat statistik yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametik Kolmogorov - Smirnov. Dalam mengambil keputusan dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

1.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2005).

1.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Uji heterokedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan metode grafik, maka hanya perlu melihat adanya tidaknya pola tertentu yang terdapat pada scatterplot, dasar pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu seperti titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau dependen variabel (Y) secara bersama-sama. Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen

X_1, X_2, X_3 = Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter koefisien masing – masing variabel

a = Konstanta

Dalam hubungan dengan penelitian ini, variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3). Sedangkan variabel dependen adalah Belanja Modal (Y) sehingga persamaan regresi berganda estimasinya:

Dimana:

Y = Belanja Modal

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Alokasi Khusus

β_1 = Koefisien regresi dari variabel X_1 Pendapatan Asli Daerah

β_2 = Koefisien regresi dari variabel X_2 , Dana Alokasi Umum

β_3 = Koefisien regresi dari variabel X_3 , Dana Alokasi Khusus

a = konstanta

e = Error

Sebelum melakukan regresi linear berganda menurut Ghazali (2016 : 81) harus memenuhi uji prasyarat / uji asumsi klasik yang meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas .

a. Uji Normalitas.

Menurut Ghozali (2016; 154) “uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap model yang diuji.

Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05 , maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05 , maka residual tidak memiliki distribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik normal *probability plot* dan grafik histogram.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas menurut Ghozali (2016 : 154) sebagai berikut:

1. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan
2. jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas.

Menurut Ghozali, (2016; 114). “Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen . Multikolinieritas dapat dideteksi

dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $1 < 0.10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut ghozali (2016; 134) “ uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain”. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Menurut ghozali (2016:134) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu :

- 1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
- 2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0 : H_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,

$H_a : H_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2012:244) , uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :

- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

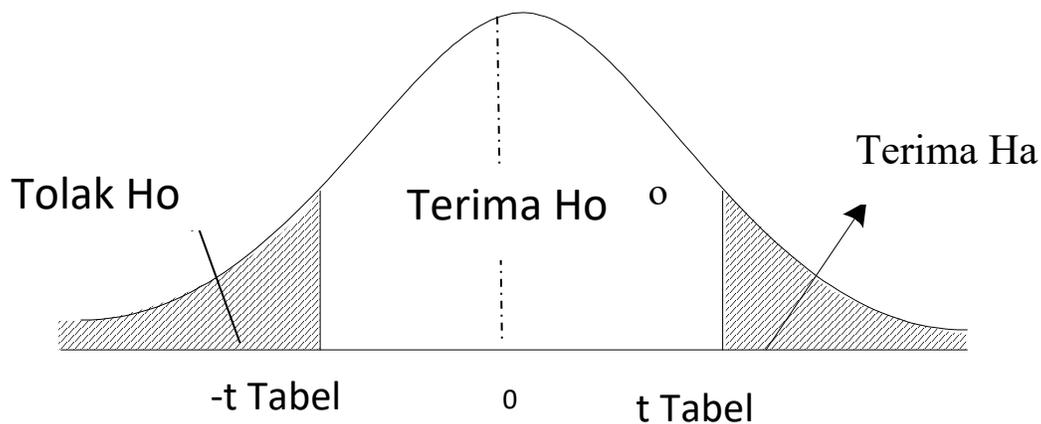
Rumus Uji t adalah sebagai berikut: (Sugiyono, 2012; 244)

keterangan:

t = nilai t hitung

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel



Gambar 3.1

Kriteria Pengujian Hipotesis (Uji t)

b. Uji Signifikan Simultan (Uji- F)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya:

- $H_0 : H_i = 0$, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- $H_a : H_i \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
-

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)
- Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS

- Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

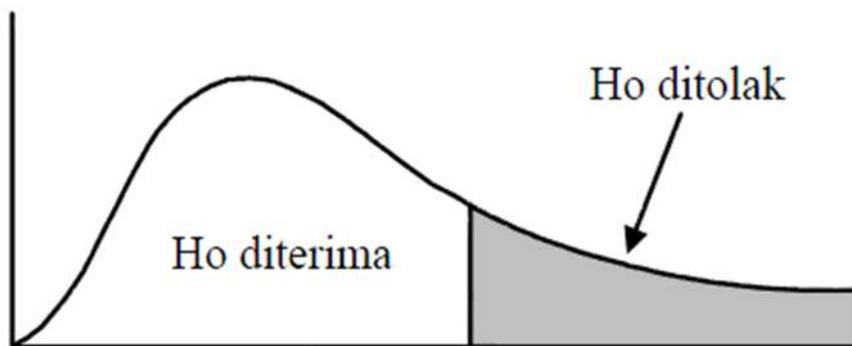
Rumus Uji F seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012; 157) sebagai berikut:

Keterangan:

N = banyak sampel

m = banyak prediktor

R = koefisien korelasi antara kriterium dengan predictor



Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis (Uji F)

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain nilai koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel yang diteliti X dan Y sebagai variabel terikatnya. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka

semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Jika determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X adalah besar terhadap variabel Y. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut :

$$KP = (R_{x1,x2,y})^2 \times 100\%$$

Hal ini menunjukkan model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan semakin tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen yang ada. Dalam sub bab ini akan dilakukan analisis data dari variabel – variabel penelitian baik secara deskriptif maupun statistik yang telah diolah menggunakan SPSS 23. Analisis data atas penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang di rinci di bawah ini.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi menyeluruh mengenai karakteristik variabel yang utama. Variabel terikat atau dependen yang digunakan adalah Belanja Modal, sedangkan variabel bebas atau independen yang di indikasikan berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, maka perlu dilakukan beberapa tahap analisis dari data yang ada. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut disajikan statistik deskriptif Laporan Keuangan pada Kabupaten Deli Serdang periode 2009 - 2016.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 – 2016 dalam satuan juta rupiah

Tahun	Pendapatn Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2009	103.686	784.016	91.188	291.177
2010	120.537	793.141	85.589	203.001
2011	213.791	888.557	67.178	314.745
2012	291.017	1.100.013	65.478	334.254
2013	328.348	1.260.755	81.876	352.334
2014	433.885	1.363.811	104.687	553.705
2015	515.293	1.396.297	117.332	491.710
2016	573.010	1.494.821	408.339	561.285

Sumber : Laporan Keuangan kabupaten Deli Serdang

**Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif Belanja Modal**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	8	2.03E11	5.61E11	3.8778E11	1.31675E11
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Diolah peneliti lampiran 2

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 Tahun Anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 8, dimana rata-rata jumlah Belanja Modal (Y) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 387 Miliar dengan jumlah BM terendah Rp.203 Miliar pada tahun 2010 dan BM tertinggi Rp.561 Miliar pada tahun 2016.

Tabel 4.3
Analisis Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	8	1.04E11	5.73E11	3.2245E11	1.74783E11
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Diolah peneliti lampiran 2

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 8, dimana rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (X1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.322 milyar dengan jumlah PAD terendah Rp.104 Milyar pada tahun 2009 dan PAD tertinggi Rp.573 milyar pada tahun 2016.

Tabel 4.4
Analisis Statistik Deskriptif Dana Alokasi Umum
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	8	7.84E11	1.49E12	1.1352E12	2.84839E11
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Diolah peneliti lampiran 2

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 8, dimana rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (X2) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 1,135 Triliyun dengan jumlah DAU terendah Rp.784 Miliyar pada tahun 2009 dan DAU tertinggi Rp.1,49 Triliyun pada tahun 2016.

Tabel 4.5
Analisis Statistik Deskriptif Dana Alokasi Khusus
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAK	8	6.54E11	4.083E11	1.2793E11	3.21953E11
Valid N (listwise)	8				

Sumber : Diolah peneliti lampiran 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah “ dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu ”. Berdasarkan hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 8, dimana rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (X3) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 127 Miliyar dengan jumlah DAK terendah Rp.65 Miliyar pada tahun 2012 dan DAK tertinggi Rp.408 Miliyar pada tahun 2016.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Berdasarkan tujuan dan hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya, maka dalam melakukan analisis data akan disajikan tabel hasil uji statistik normalitas data berdasarkan output SPSS uji *one-sample kolmogorov-smirnov test* untuk variabel dependen Belanja Modal, variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada penelitian ini ditentukan bahwa nilai signifikansi 5%. Sehingga jika nilai signifikansi kurang dari 5%, maka data tidak terdistribusi secara normal sebaliknya jika signifikansi lebih dari 5% maka data terdistribusi normal.

Tabel 4.6
Uji Normalitas- One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU	DAK	BM
N		8	8	8	8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.2200E11	2.0384E12	8.2738E11	3.8738E13
	Std. Deviation	1.74934E11	2.86576E12	1.09723E11	1.31520E13
Most Extreme Differences	Absolute	.126	.451	.258	.231
	Positive	.126	.451	.207	.231
	Negative	-.115	-.331	-.258	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		.356	1.275	.728	.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	.077	.664	.787

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Diolah peneliti lampiran 3

Berdasarkan data dari hasil pengolahan menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05 pada tabel 4.6 data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (BM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar PAD = 1.000 , DAU = 0.077, DAK = 0.664, BM = 0.787 > 0.05 yang artinya bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016; 114), “ uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation*

factor (VIF). Nilai *cut off* yang dinilai umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah $1 > 0.01$ atau sama dengan $VIF < 10$.

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.801	1.249
DAU	.555	1.802
DAK	.490	2.040

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Diolah peneliti lampiran 3

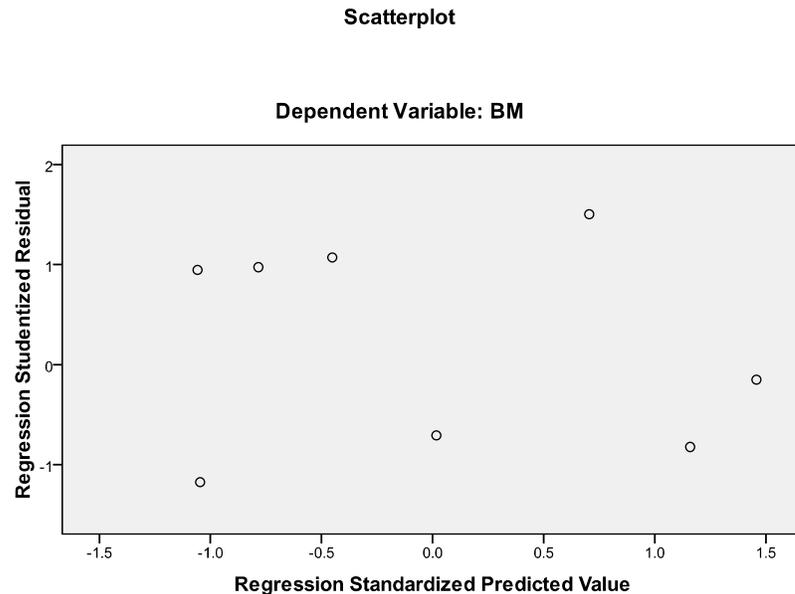
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.10 diperoleh nilai VIF sebesar PAD = 1.249, DAU = 1.802 dan DAK = 2.04 < 10 maka dapat diartikan bahwa data pada variabel yang akan diteliti tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016; 134) “uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan *variancedan* residual satu pengamatan ke pengamatan lain”. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas adalah dengan cara melihat *grafik plot* antara nilai prediksi variabel dependen. Menurut ghozali (2016; 134) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu :

- 3) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas,

- 4) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokesatisitas.



Gambar 4.1 Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas . hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

2. Analisis regresi linear

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Regerasi adalah suatu metode untuk membentuk hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Tabel 4.8
Nilai Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4.037E12	2.392E13	
PAD	66.430	14.266	.884
DAU	-.089	1.046	-.019
DAK	16.307	29.068	.136

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Diolah peneliti lampiran 4

Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi linear berganda yang mempunyai formulasi : $Y = a + b_1X_{PAD} + b_2X_{DAU} + b_3X_{DAK} + \epsilon$, sehingga diperoleh persamaan :

$$Y = 4.073E12 + 66.430PAD - 0.089DAU + 16.307DAK$$

Konstanta regresi (α) sebesar 4.037E12 menunjukkan bahwa apabila nilai PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) dinyatakan konstan pada angka 0, maka nilai BM(Y) meningkat sebesar 4.037E12 satuan.

Koefisien regresi (β_1) pada PAD bernilai 66.430 mempunyai hubungan Positif pada BM. Berarti menunjukkan bila nilai PAD (X1) naik 1 satuan, maka nilai dari BM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 66.430 satuan dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) konstan.

Koefisien regresi (β_2) pada DAU bernilai -0.089 mempunyai hubungan negatif pada BM. Berarti menunjukkan bila nilai DAU (X2) naik 1 satuan, maka nilai dari BM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.089 satuan dengan asumsi variabel Dana Alokasi Khusus (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (X1) konstan.

Koefisien regresi (β_3) pada DAK bernilai 16.307 mempunyai hubungan positif pada BM. Berarti menunjukkan bila nilai DAK (X_3) naik 1 satuan, maka nilai dari BM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 16.307 satuan dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_1) konstan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikasi Parsial (uji -t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji hipotesis parsial yang dilakukan pada setiap variabel independen seperti tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.037E12	2.392E13		.169	.874
PAD	66.430	14.266	.884	4.657	.010
DAU	-.089	1.046	-.019	-.085	.936
DAK	16.307	29.068	.136	.561	.605

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Diolah peneliti lampiran 4

1) Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Bentuk pengujian hipotesis berdasarkan statistic dan kurva dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Pengujian Berdasarkan Statistik

Menurut Sugiyono (2012; 244), “uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat”.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :

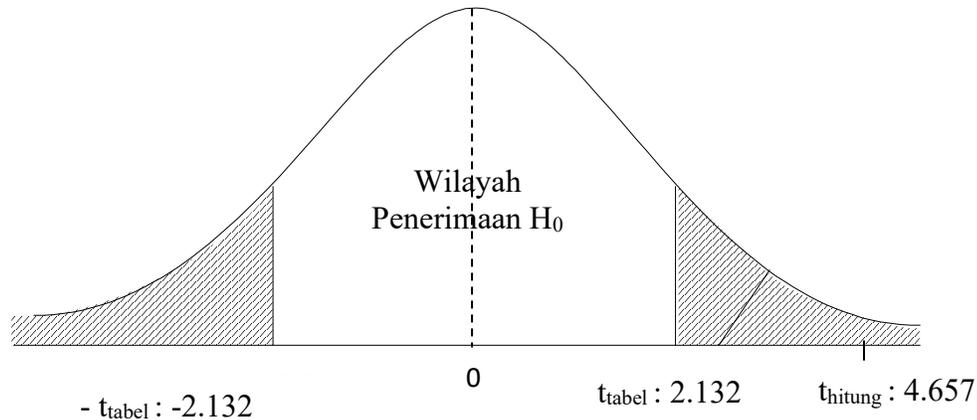
- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai t -hitung sebesar 4.657. dengan $\alpha = 5\%$, t -tabel (5%;4) diperoleh nilai t -tabel sebesar 2.132. dapat diketahui bahwa t -hitung (4.657) $>$ t -tabel (2.132) sehingga disimpulkan bahwa H_a diterima , artinya ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009 - 2016.

Selanjutnya nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.010 dibawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009 - 2016.

b) Berdasarkan Kurva

Pengujian hipotesis secara lebih luas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 4.2 Kurva Uji Variabel Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat jika nilai t_{hitung} dari variabel Pendapatan Asli Daerah berada di wilayah penerimaan H_a sehingga dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak.

2) Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Bentuk pengujian hipotesis berdasarkan statistic dan kurva dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Pengujian Berdasarkan Statistik

Menurut Sugiyono (2012; 244) , uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :

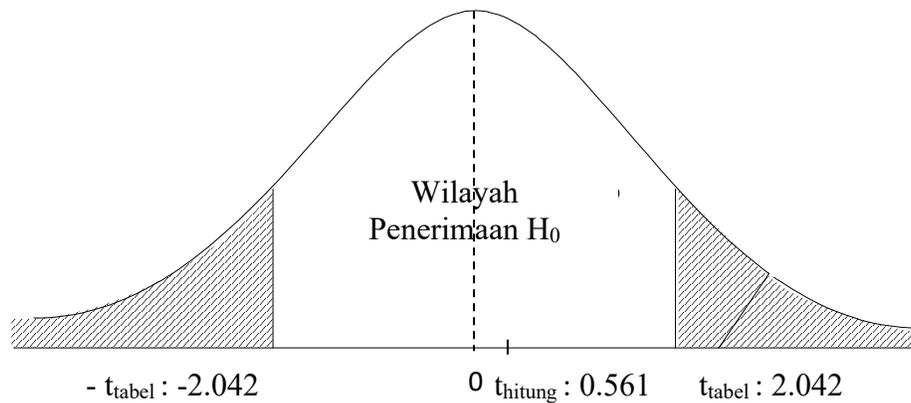
- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai t -hitung sebesar -0,085. dengan $\alpha = 5\%$, t -tabel (5%;4) diperoleh nilai t -tabel sebesar 2.132. dapat diketahui bahwa t -hitung (-0,085) $<$ t -tabel (2.132) sehingga disimpulkan bahwa H_a ditolak , artinya tidak ada pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009 - 2016.

Selanjutnya nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.605 diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009 - 2016.

b) Berdasarkan Kurva

Pengujian hipotesis secara lebih luas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 4.3 Kurva Uji Variabel Dana Alokasi Umum

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat jika nilai t_{hitung} dari variabel Dana Alokasi Umum berada di wilayah penerimaan H_0 sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

3) Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Bentuk pengujian hipotesis berdasarkan statistic dan kurva dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Pengujian Berdasarkan Statistik

Menurut Sugiyono (2012; 244) , uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)

- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :

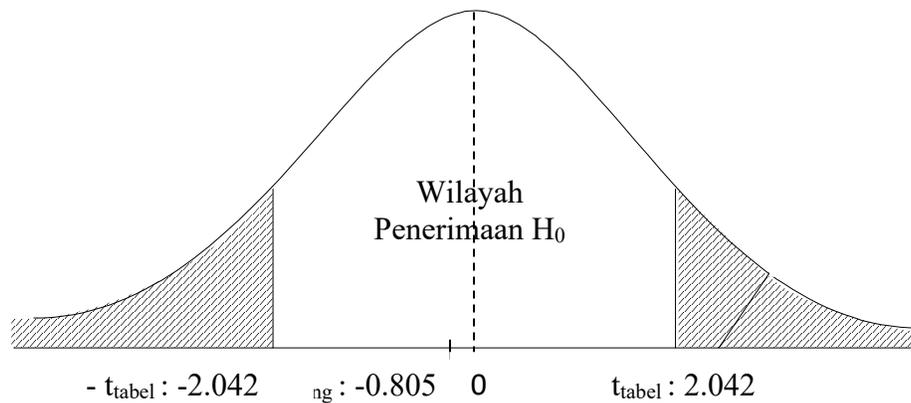
- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai t -hitung sebesar 0.561. dengan $\alpha = 5\%$, t -tabel (5%;4) diperoleh nilai t -tabel sebesar 2.0281. dapat diketahui bahwa t -hitung (-0.561) $<$ t -tabel (2.042) sehingga dapat disimpulkan jika H_0 ditolak , artinya tidak ada pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009-2016.

Selanjutnya nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.605 diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupataen Deli Serdang Periode 2009-2016.

b) Berdasarkan Kurva

Pengujian hipotesis secara lebih luas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 4.4 Kurva Uji Variabel Dana Alokasi Khusus

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat jika nilai t_{hitung} dari variabel Dana Alokasi Khusus berada di wilayah penerimaan H_0 sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Hasil uji F dapat dihasilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.071E27	3	3.571E26	10.227	.024 ^a
Residual	1.396E26	4	3.491E25		
Total	1.211E27	7			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Diolah peneliti lampiran 4

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara serentak. Bentuk pengujian hipotesis berdasarkan statistic dan kurva dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Pengujian Berdasarkan Statistik

Kriteria pengambilan keputusan:

- Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (diterima)
- Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (ditolak).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS

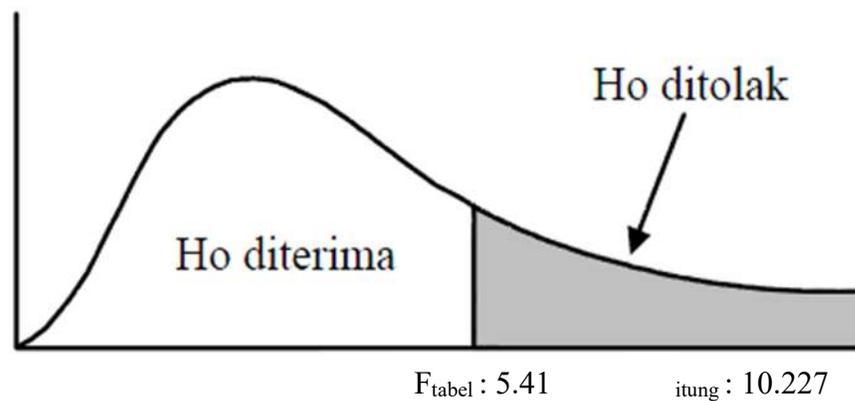
- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh F-hitung sebesar 10.227. dengan $\alpha = 5\%$, dk pembilang : 3, dk penyebut : 5 ($5\% ; 3 ; 5$) diperoleh F-tabel sebesar 5.41. dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa F-hitung (10.227) $>$ F-tabel (5.41) sehingga dapat disimpulkan H_a diterima, artinya ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten Deli Serdang periode 2009 - 2016

Selanjutnya nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.024 diatas 0.05 maka dapat simpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal pada pada pemerintah kabupaten Deli Serdang periode 2009 - 2016

b) Berdasarkan Kurva

Pengujian hipotesis secara lebih luas dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 4.4 Kurva Uji F

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat jika nilai F_{hitung} berada diwilayah penerimaan karena nilainya lebih besar dari F_{tabel} sehingga dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain nilai koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel yang diteliti X dan Y sebagai variabel

terikatnya. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Jika determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X adalah besar terhadap variabel Y.

Hal ini menunjukkan model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan semakin tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.798	5.90861E12

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Diolah peneliti lampiran 4

Nilai koefisien determinasi berdasarkan hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.798 yang berarti bahwa pengaruh variabel yang diuji sebesar 79.8% sedangkan sebesar 21.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 4.657 dengan $\alpha = 5\%$, t-tabel (5%;4) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.132. dapat diketahui bahwa t-

hitung ($4.657 > t\text{-tabel } (2.132)$), dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.010 dibawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 - 2016. Dengan adanya indikasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, maka ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang sangat baik, dimana setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dibandingkan penurunan yang tentunya akan berdampak positif pada perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan terbesar yang diperoleh Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan untuk berbagai pembangunan diantaranya digunakan untuk belanja modal daerah. Peningkatan Alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan Pendapatan Daerah tersebut. Antara PAD dengan belanja modal terjadi suatu hubungan saling terkait dalam keuangan pemerintah daerah. . Besar kecilnya Belanja Modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Isti Permatasari,dkk tahun 2016 membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0.085. dengan $\alpha = 5\%$, t-tabel (5%;4) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.132. dapat diketahui bahwa t-hitung (-0.085) < t-tabel (2.132) dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.936 diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 - 2016. Hal ini disebabkan karena tidak sepenuhnya Pemerintah Daerah mengandalkan DAU yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk Dana Perimbangan yang mempunyai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya,

daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang Askam Tausikal (2008) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -0.805. dengan $\alpha = 5\%$, t-tabel (5%;4) diperoleh nilai t-tabel sebesar 2.0281. dapat diketahui bahwa t-hitung (0.561) < t-tabel (2.042) dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.605 diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 - 2016. Hal ini disebabkan sebagian besar prioritas kegiatan nasional yang akan dibiaya menggunakan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat sebagai bantuan, sudah menjadi kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Alokasi Khusus untuk Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Daerah yang keuangannya kurang mencukupi akan terbantu oleh DAK, sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antar daerah. Di samping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh Karena

itu, DAK menjadi sangat penting fungsinya untuk mencapai kegiatan yang menjadi program nasional. Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir,dkk (2009), membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 10.227. dengan $\alpha = 5\%$, dk pembilang : 3, dk penyebut : 5 (5% ; 3 ; 5) diperoleh F-tabel sebesar 5.41. dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa F-hitung (10.227) > F-tabel (5.41), dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.024 diatas 0.05 maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal pada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode 2009 - 2016.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal disebabkan oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan akan dana yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, hal ini dipengaruhi berbagai hal di Pendaptan Asli Daerah yang

belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan pokok Pemerintah Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang diprioritaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang bersifat nasional.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saptaningsih (2009) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 – 2016.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 – 2016.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 – 2016.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 – 2016.

B.KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh
2. pengaruh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen, dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. sedangkan masih ada faktor-faktor lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi Belanja Modal.
3. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang Periode 2009 - 2016 saja.

C. SARAN

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja modal. Oleh sebab itu perlu adanya upaya-upaya seperti memberikan target yang harus dipenuhi berdasarkan criteria wilayah pengutipan pajak dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang mampu memenuhi belanja modal pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya pelayanan, pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan alokasi dana umum yang

disediakan oleh pemerintah pusat pada kegiatan yang bersifat produktif sehingga kedepannya pemerintah daerah tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

3. Pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus sebagai dana yang digunakan untuk kegiatan prioritas nasional, untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggunakan dana tersebut berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah sehingga program yang dijalankan dengan baik, selain dari itu pemerintah daerah juga dapat mengikut sertakan perusahaan – perusahaan yang terdapat dalam ruang lingkup daerahnya untuk sebagai saran bantu baik dalam bentuk dana atau pun sebagainya dalam menjalankan program kegiatan prioritas nasional, sehingga pencapaiannya kegiatan tersebut dapat segera terrealisasi dan mengurangi beban pemerintah pusat.
4. Berdasarkan hasil penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal disebabkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan akan dana yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah daerah agar tidak bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus seperti pembentukan program pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Modal misalnya Belanja Daerah, luas wilayah dan

variabel lainnya. Dan peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang menyerupai penelitian ini disarankan untuk menggunakan objek penelitian pada pemerintahan kabupaten lain yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat memberikan hasil lebih baik terhadap masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- David Harianto dan Prio Hari Adi, 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 juli 2007*.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Halim, Abdul dan Mamduh M. Hanafi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta
- Isdijoso, Brahmantio, 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta), *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal Accountability. Vol 2 No 1. Hal 1-10*.
- Republik Indonesia , *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
-, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. Alfabeta: Bandung
- Syaiful. 2006. "Pengertian dan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan".
<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>
- Situngkir, Anggiat, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal (Pemerintah Kabupaten Daerah, Sumatera Utara)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol 2 No 1. Hal 9-18.
- Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 2 (2).
- Syaiful, 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan. www.bappenas.go.id
- Setiyani, S.E. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2007. *Tesis*. Universitas Stikubank Semarang.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Vol. 12 No. 1. Hal 88-99.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : BAYU RUKMA

Jenis Klamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 22 Maret 1974

Alamat : Jln. Pasar V Gang Salak 22 Tembung Kec. P Sei Tuan

Pekerjaan : ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Deli Serdang

Jabatan Saat Ini : Kasubbag Keuangan

Nama Orang Tua (Ayah) : ANWAR HUSSEIN YAHYA (Alm)
(Ibu) : Hj. TUMINI

Pekerjaan Orang tua (Ayah) : PNS
(Ibu) : Ibu Rumah Tangga

Status : Menikah

Nama Istri : YUSNIAR

Anak – Anak ; 1. ASY SYADDAD
2. IBNU Kholdun
3. NOORA NABILA
4. IBNU MILKAN

Pendidikan : SD Swasta Nurul Islam Indonesia
(Lulus Tahun 1987)
: SMP Swasta Nurul Islam Indonesia
(Lulus Tahun 1991)
: Madrasah Aliyah Darunnajah Jakarta
(Lulus Tahun 1994)

: Strata - 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung

(Lulus Tahun 1998) Fakultas Tarbiyah

: Strata - 1 Univ. Pembinaan Masyarakat Indonesia

(Lulus Tahun 2012) Fakultas Ekonomi

Lampiran 1 Data mentah

Tahun	Pendapatn Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2009	103.686.291.553,30	784.016.979.000,00	91.188.000.000,00	291.177.164.583,00
2010	120.537.227.592,36	793.141.685.000,00	85.589.900.000,00	203.001.498.764,00
2011	213.791.544.828,53	888.557.245.000,00	67.178.200.000,00	314.745.971.384,00
2012	291.017.501.163,27	1.100.013.616.000,00	65.478.160.000,00	334.254.373.140,00
2013	328.348.147.362,35	1.260.755.135.000,00	81.876.590.000,00	352.334.308.750,00
2014	433.885.507.125,82	1.363.811.250.000,00	104.687.700.000,00	553.705.889.982,91
2015	515.293.681.488,42	1.396.297.620.000,00	117.332.680.000,00	491.710.226.082,82
2016	573.010.351.004,96	1.494.821.153.000,00	408.339.324.652,00	561.285.600.326,63

Lampiran 2 Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	8	2.03E11	5.61E11	3.8778E11	1.31675E11
Valid N (listwise)	8				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	8	1.04E11	5.73E11	3.2245E11	1.74783E11
Valid N (listwise)	8				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	8	7.84E11	1.49E12	1.1352E12	2.84839E11
Valid N (listwise)	8				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAK	8	6.54E11	4.083E11	1.2793E11	3.21953E11
Valid N (listwise)	8				

Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU	DAK	BM
N		8	8	8	8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.2200E11	2.0384E12	8.2738E11	3.8738E13
	Std. Deviation	1.74934E11	2.86576E12	1.09723E11	1.31520E13
Most Extreme Differences	Absolute	.126	.451	.258	.231
	Positive	.126	.451	.207	.231
	Negative	-.115	-.331	-.258	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		.356	1.275	.728	.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000	.077	.664	.787

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.801	1.249
DAU	.555	1.802
DAK	.490	2.040

a. Dependent Variable: BM

Lampiran 4 Regresi Dan Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4.037E12	2.392E13	
PAD	66.430	14.266	.884
DAU	-.089	1.046	-.019
DAK	16.307	29.068	.136

a. Dependent Variable: BM

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.037E12	2.392E13		.169	.874
PAD	66.430	14.266	.884	4.657	.010
DAU	-.089	1.046	-.019	-.085	.936
DAK	16.307	29.068	.136	.561	.605

a. Dependent Variable: BM

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.071E27	3	3.571E26	10.227	.024 ^a
Residual	1.396E26	4	3.491E25		
Total	1.211E27	7			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.798	5.90861E12

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM